



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kebijakan Penyusunan dan Pelaporan BMN

Disampaikan oleh:

Direktur Barang Milik Negara

Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan BMN

Jakarta, 4 Juni 2018

Dasar Hukum

Pasal 9 huruf f UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN

PMK Nomo 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN

PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN

PMK Nomor 224/PMK.05/2016 (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat)

PMK 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat

PMK 118/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali BMN

Buletin Teknis SAP

Ruang Lingkup dan Siklus BMN

Definisi

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

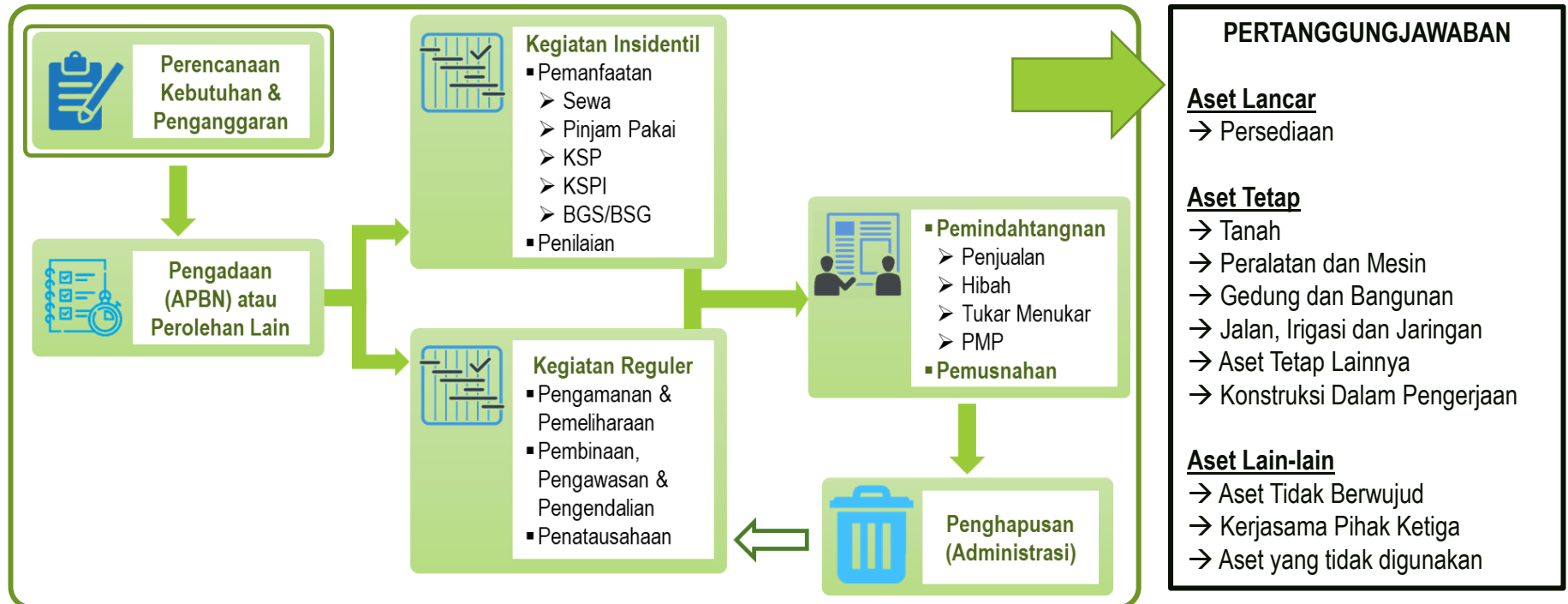
Ruang Lingkup

Barang Milik Negara meliputi:

- Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN
- Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

- hibah/sumbangan atau yg sejenis
- pelaksanaan perjanjian/ kontrak
- berdasarkan ketentuan undang-undang
- berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap

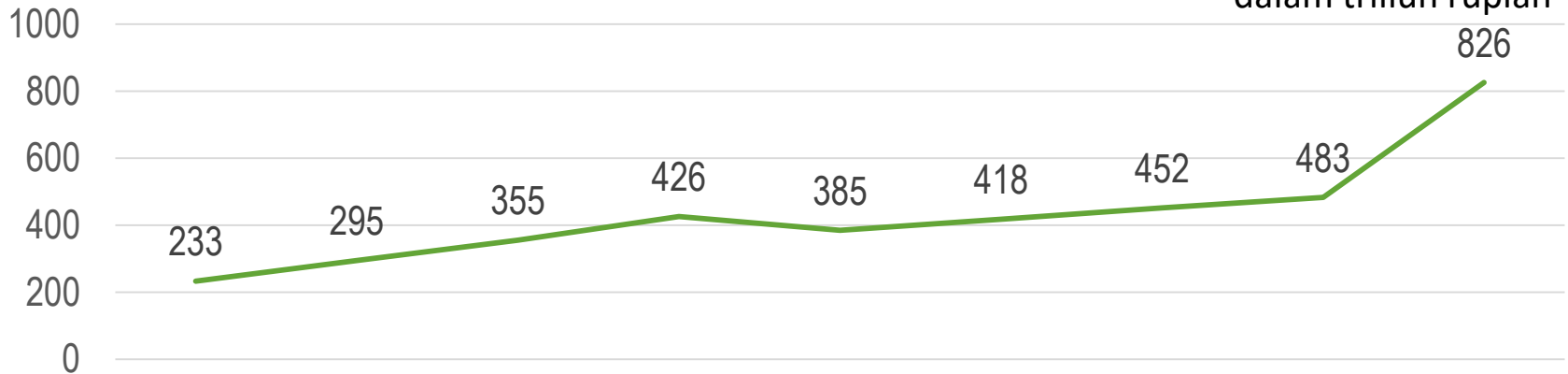
Siklus Pengelolaan BMN



Nilai BMN dan Opini BPK Pada Kementerian Pertahanan

Nilai LBMN 2009 - 2017 (Audited)

dalam triliun rupiah



Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Opini LK	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP	WDP

- Data berdasarkan LBMN 2009-2017 (Audited)

- Nilai BMN yang disajikan adalah nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca Laporan Keuangan)

- Tahun 2013 penerapan kebijakan penyusutan Aset Tetap, nilai BMN turun karena nilai yang disajikan adalah nilai netto BMN

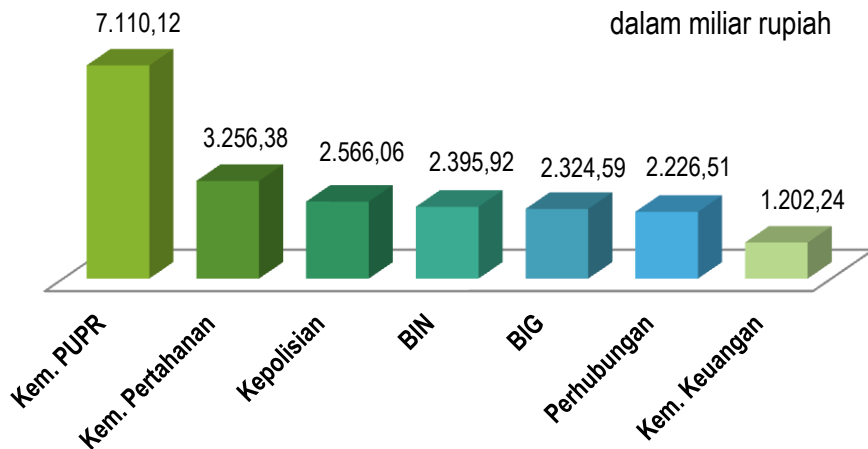
- Nilai BMN termasuk hasil revaluasi atas AT (tanah, GB, JJBA) yang di *take out* pada LKKL Kemhan

Signifikansi Nilai BMN Pada Kementerian Pertahanan Terhadap LBMN

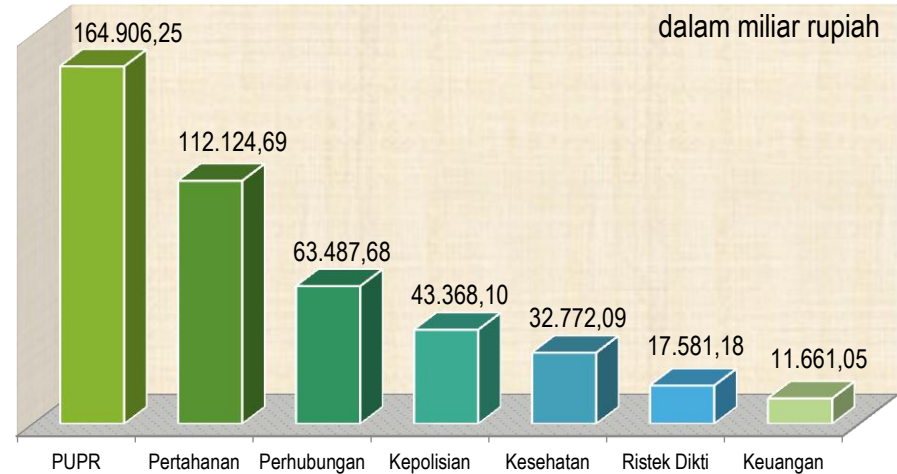
KL dengan kenaikan nilai BMN di atas Rp50 T (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)

BA	K/L	Mutasi Netto Positif	%
033	Kemen. PUPRa	399.075.849.296.599	20,01%
012	Kemen. Pertahanan	354.397.767.176.061	17,77%
007	Kemen. Setneg	283.578.927.548.406	14,22%
042	Kemen. Ristek Dikti	186.493.845.491.464	9,35%
060	Kepolisian Negara RI	178.290.415.173.358	8,94%
022	Kemen. Perhubungan	122.941.340.372.870	6,16%
015	Kemen. Keuangan	73.788.831.520.721	3,70%
xxx	Kementerian Lainnya	395.817.709.780.920	19,85%
Jumlah		1.994.384.686.360.400	100%

KL dengan nilai ATB di atas Rp1 T



KL dengan nilai penyusutas di atas Rp10 T (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)



KL dengan nilai BMN di atas Rp100 T (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)

No	BA	K/L	Rp	%
1	033	Kemen. PUPR	1.272.133.015.711.620	30,24%
2	012	Kemen. Pertahanan	826.600.691.896.540	19,65%
3	007	Kemen. Setneg	376.613.883.281.865	8,95%
4	022	Kemen. Perhubungan	321.260.246.439.103	7,64%
5	042	Kemen. Ristek Dikti	288.494.696.843.700	6,86%
6	060	Kepolisian Negara RI	260.296.915.514.529	6,19%
7	015	Kemen. Keuangan	110.646.140.697.941	2,63%
8	xxx	Kemen. Lainnya	750.096.075.676.323	17,83%
Total			4.206.141.666.061.620	100,00%

Permasalahan Penatausahaan BMN

Hasil Pemeriksaan BPK pada Kementerian Pertahanan: SPI Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Belum Memadai

Kebijakan akuntansi dan petunjuk pelaksanaannya belum sepenuhnya mengatur pengakuan dan pengukuran aset yang bersumber dari DIPA Pusat.

Kegiatan pengadaan aset/persediaan lintas tahun dan *carry over* belum diakomodasi sepenuhnya ke dalam kebijakan akuntansi.

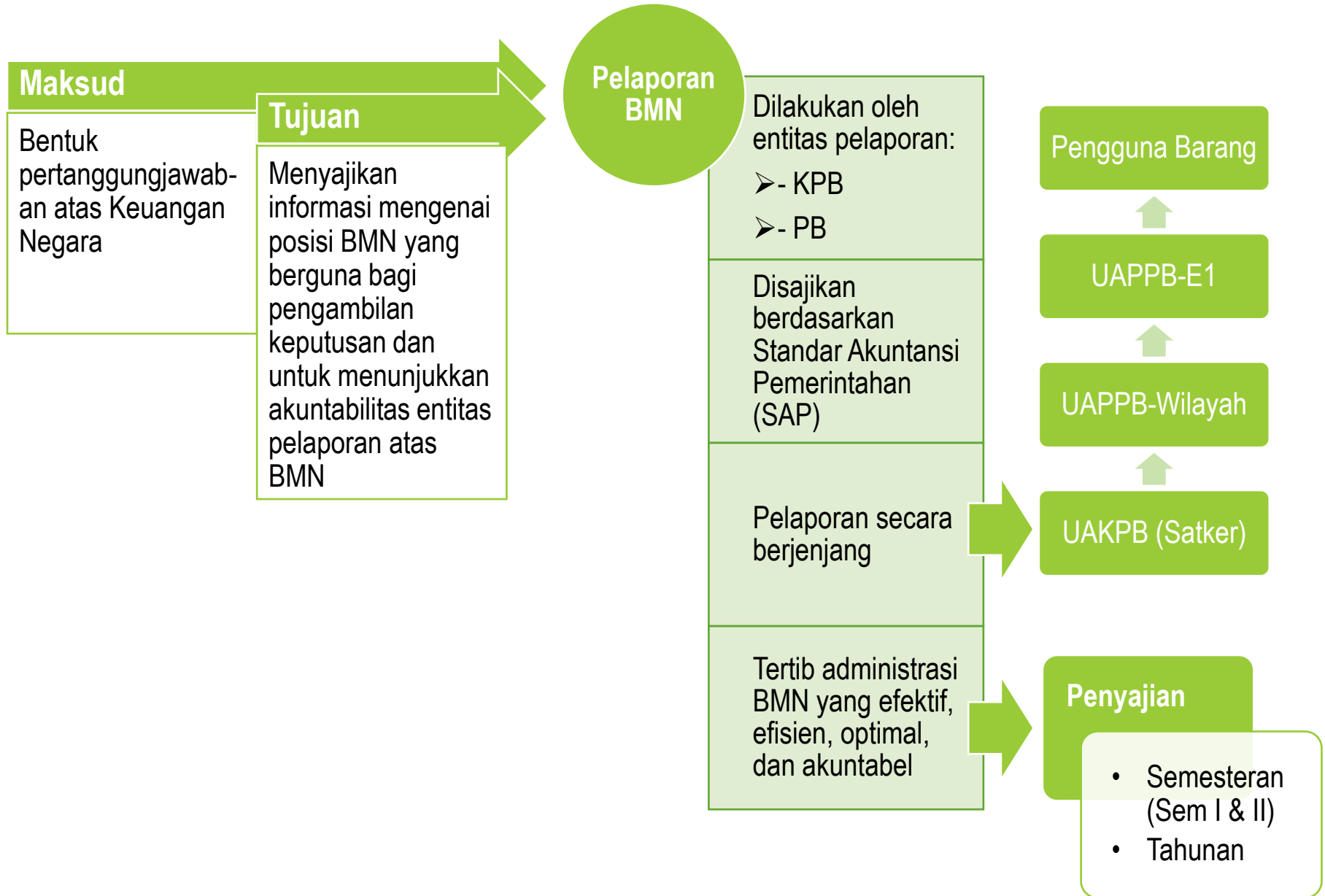
Tata cara pembukuan transfer aset dan persediaan belum diatur secara jelas dalam kebijakan akuntansi.

Pencatatan pendapatan perolehan aset belum seluruhnya tepat.

Kesalahan penganggaran Belanja Barang yang menghasilkan persediaan berpotensi menimbulkan salah saji.

Rekonsiliasi internal dan eksternal belum memadai (Penyusunan LK DIPA Pusat tidak dilakukan rekonsiliasi internal).

Pelaporan BMN



Karakteristik Kualitatif Laporan BMN

Relevan

Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*); memiliki manfaat prediktif (*predictive value*); disajikan tepat waktu; dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya.

Andal

Informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material; menyajikan setiap fakta secara jujur; serta dapat diverifikasi.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sbb:

Penyeragaman penggolongan & kodefikasi

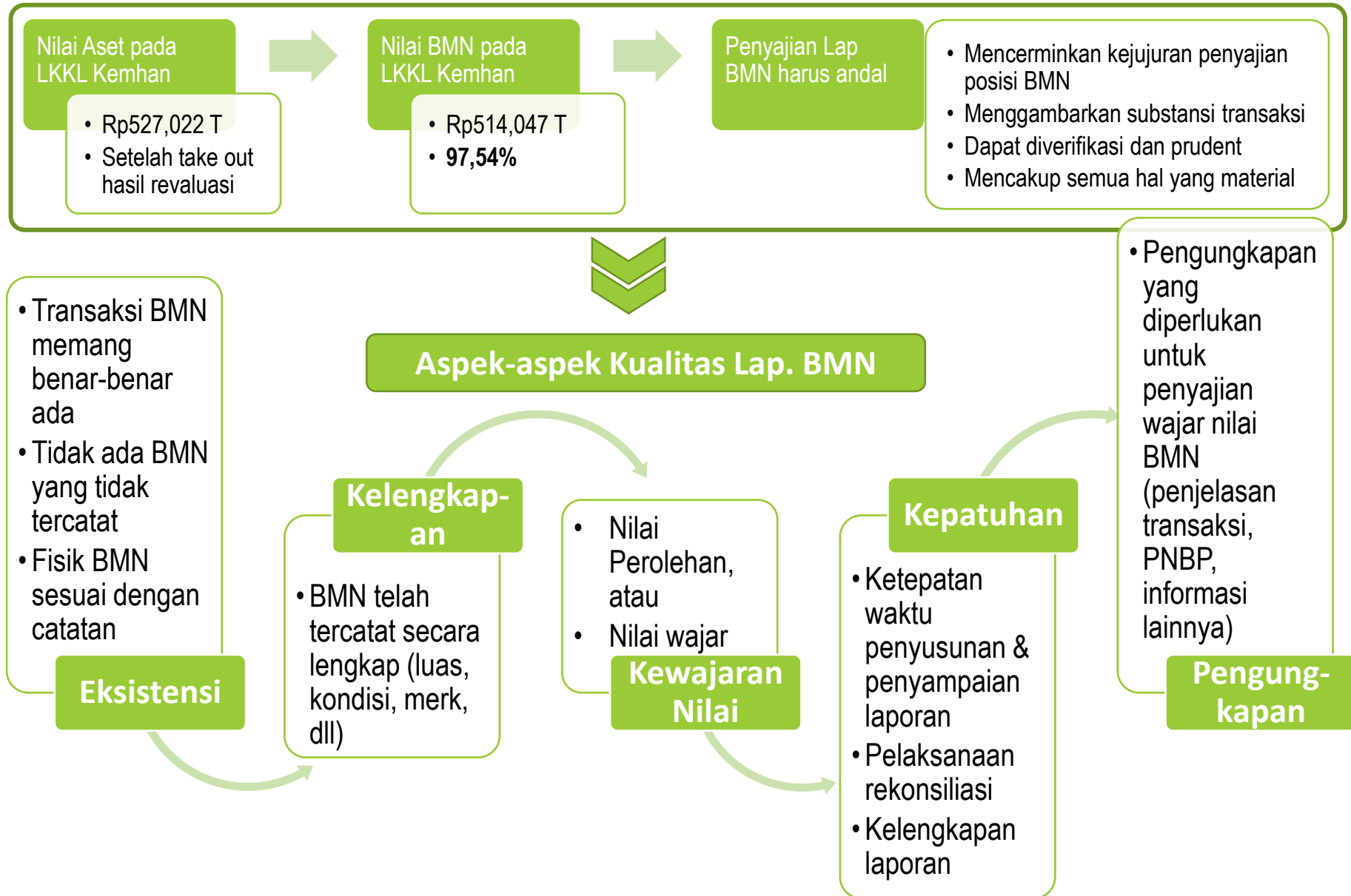
Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Kebijakan Kapitalisasi BMN

Rekonsiliasi Nilai BMN

Kebijakan Penyusutan & amortisasi BMN

Aspek-aspek Kualitas Laporan BMN



Mitigasi Pemeriksaan BPK 2018

Peningkatan kualitas SDM pengawak Persediaan dan SIMAK-BMN

Meningkatkan peran Kasatker dalam pengawasan pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal

Meningkatkan peran APIP dalam pengawasan pelaksanaan anggaran dan asistensi penyusunan LKKL dan LBMN.

Meningkatkan kontrol dan pengawasan atas Transaksi Antar Entitas (Transfer Keluar-Transfer Masuk)

Pengungkapan memadai atas transaksi-transaksi BMN, termasuk perolehan BMN dari MAK yang tidak seharusnya

Melakukan monitoring atas pelaksanaan revaluasi BMN

Revaluasi BMN

Revaluasi 2017

Kesepakatan antara Pemerintah dan BPK, hasil revaluasi 2017 tidak disajikan dalam LKPP dan LKKL

Take out hasil revaluasi dilakukan di LKKL dgn melakukan jurnal di Satker Konsolidasian

LBMN tetap menyajikan hasil revaluasi

Revaluasi 2018

Disajikan dalam LBMN dan LKKL 2018

Menjadi objek audit BPK

Mitigasi Pemeriksaan Revaluasi 2018

Satker agar memastikan bahwa seluruh objek revaluasi telah dilakukan revaluasi oleh KPKNL

Satker agar memastikan nilai hasil revaluasi telah dikoreksi ke dalam SIMAK-BMN

Satker agar memastikan nilai koreksi revaluasi antara SIMAK-BMN dan SAIBA sama

Satker agar menyimpan dokumen revaluasi dengan baik

Menyusun laporan pelaksanaan revaluasi BMN berdasarkan PMK 118/2017 dan menyampaikannya secara berjenjang ke tingkat atasnya

Meningkatkan peran APIP dalam monitoring hasil revaluasi, seperti: kelengkapan dokumen revaluasi di satker, tindak lanjut barang tidak ditemukan, pengungkapan di CaLBMN/CaLK

“Mari Berbenah Menuju Aset Manajer”

Terima Kasih

Direktorat Barang Milik Negara
Gd. Syafrudin Prawiranegara Lt. II Utara
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

Nilai BMN dan Opini BPK

Laporan Barang Pengguna 2017 (Audited)

No.	Akun Neraca	Nilai BMN	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
1	Persediaan	52.777.621.506.093	-	52.777.621.506.093
2	Tanah	602.302.661.235.919	-	602.302.661.235.919
3	Peralatan dan Mesin	190.608.089.995.169	91.621.297.260.898	98.986.792.734.271
4	Gedung dan Bangunan	46.415.014.846.422	10.171.488.818.177	36.243.526.028.145
5	Jalan dan Jembatan	10.349.094.519.846	4.957.192.774.776	5.391.901.745.070
6	Irigasi	1.041.697.565.387	247.054.965.099	794.642.600.288
7	Jaringan	1.336.385.876.559	485.633.458.923	850.752.417.636
8	Aset Tetap dalam Renovasi	4.939.632.641.104	941.417.221.763	3.998.215.419.341
9	Aset Tetap Lainnya	613.252.477.347	34.246.611.341	579.005.866.006
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.296.526.216.606	-	20.296.526.216.606
11	Hak Cipta	20.890.980.324	2.666.613.413	18.224.366.911
12	Paten	14.270.520.000	13.307.425.000	963.095.000
13	Software	1.916.441.026.558	912.544.865.398	1.003.896.161.160
14	Lisensi	29.691.326.037	4.898.612.121	24.792.713.916
15	Hasil Kajian/Penelitian	197.365.064.912	-	197.365.064.912
16	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.077.725.389.396	23.750.000	1.077.701.639.396
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	295.226.233.482	-	295.226.233.482
18	AT yang tidak digunakan dalam ops pemerintahan	5.098.248.080.919	3.480.774.028.680	1.617.474.052.239
19	ATB yang tidak digunakan dalam ops pemerintahan	1.319.824.984	1.309.456.484	10.368.500
Jumlah		939.331.155.327.064	112.873.855.862.173	826.457.299.464.891

OPINI BPK SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun	Opini BPK
2017	WDP
2016	WDP
2015	WDP
2014	WTP DPP
2013	WTP

- Nilai BMN yang disajikan adalah nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca Laporan Keuangan)

- Nilai BMN termasuk hasil revaluasi atas AT (tanah, GB, JJBA) yang di *take out* pada LKKL Kemhan.